

Konsep Al-Kharaj Abu Yusuf sebagai Instrumen Stabilitas Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Modern

Ika Nurlaela¹

¹Manajemen Bisnis Syariah, Institut Agama Islam As-syifa, Indonesia

Correspondence author: ikanurlaela62@gmail.com



Abstract

This study aims to analyze the concept of al-kharaj in Abu Yusuf's economic thought and examine its relevance as an instrument for economic stability and modern social welfare. The study employs a qualitative approach using a library research method. The primary source is Abu Yusuf's Kitab al-Kharaj, complemented by contemporary literature on Islamic economics, fiscal policy, and social welfare. Data were analyzed using qualitative content analysis to identify and interpret key concepts related to fiscal justice, the muqasamah system, wealth distribution, and the role of the state in public financial management. The findings reveal that al-kharaj functions not merely as a land tax but as a comprehensive fiscal instrument grounded in the principles of justice, ability to pay, public welfare, and accountability. Abu Yusuf's muqasamah system is considered more equitable and adaptive because it aligns tax obligations with the productive capacity of taxpayers. Furthermore, revenues generated from al-kharaj are intended to finance public infrastructure, social services, and social protection programs that contribute to economic stability and societal welfare. These findings suggest that Abu Yusuf's fiscal thought remains relevant as a normative foundation for developing inclusive, equitable, and sustainable fiscal policies in contemporary Muslim-majority societies.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep al-kharaj dalam pemikiran Abu Yusuf serta relevansinya sebagai instrumen stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat modern. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Sumber utama penelitian adalah Kitab al-Kharaj karya Abu Yusuf yang dianalisis bersama berbagai literatur kontemporer mengenai ekonomi Islam, kebijakan fiskal, dan kesejahteraan sosial. Analisis data dilakukan melalui *qualitative content analysis* untuk mengidentifikasi dan menginterpretasikan konsep-konsep utama yang berkaitan dengan keadilan fiskal, sistem muqasamah, distribusi kekayaan, dan peran negara dalam pengelolaan keuangan publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa al-kharaj tidak hanya berfungsi sebagai pungutan atas tanah, tetapi juga sebagai instrumen fiskal yang berlandaskan prinsip keadilan, kemampuan membayar, kemaslahatan, dan akuntabilitas. Sistem muqasamah yang dikembangkan Abu Yusuf dinilai lebih adaptif dan berkeadilan karena menyesuaikan beban pajak dengan tingkat produktivitas masyarakat. Selain itu, penerimaan negara dari al-kharaj diarahkan untuk pembiayaan infrastruktur, pelayanan publik, dan perlindungan sosial yang mendukung stabilitas ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa pemikiran Abu Yusuf tetap relevan sebagai landasan normatif bagi pengembangan kebijakan fiskal yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di era kontemporer.

Keywords:

Al-Kharaj; Abu Yusuf; Islamic Fiscal Policy; Economic Stability; Social Welfare

Kata kunci:

Al-Kharaj; Abu Yusuf; Kebijakan Fiskal Syariah; Stabilitas Ekonomi; Kesejahteraan Masyarakat

Article History: Received: 27 Februari 2026 | Revised: 10 Mei 2026 | Accepted: 02 Juni 2026
| Published: 03 Juni 2026



I. Pendahuluan

Pemikiran ekonomi Islam klasik terus menjadi rujukan penting dalam pengembangan kebijakan fiskal kontemporer, khususnya di negara-negara yang berupaya mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam tata kelola ekonomi publik. Salah satu tokoh yang memberikan kontribusi signifikan dalam bidang tersebut adalah Abu Yusuf (731–798 M), murid utama Imam Abu Hanifah sekaligus Qadhi al-Qudhat pada masa Dinasti Abbasiyah. Melalui karya monumentalnya, *Kitab al-Kharaj*, Abu Yusuf merumuskan prinsip-prinsip perpajakan yang menekankan keadilan, proporsionalitas, akuntabilitas, dan kemaslahatan publik sebagai fondasi pengelolaan keuangan negara (Abu Yusuf, 1979).

Dalam perspektif Abu Yusuf, al-kharaj tidak hanya dipahami sebagai pajak atas tanah, tetapi juga sebagai instrumen fiskal yang berfungsi menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat. Sistem perpajakan harus mempertimbangkan kemampuan wajib pajak, produktivitas ekonomi, serta menghindari praktik pemungutan yang bersifat eksploitatif. Oleh karena itu, Abu Yusuf lebih mengutamakan sistem *muqasamah* yang berbasis proporsi hasil produksi dibandingkan sistem *misahah* yang menetapkan pungutan tetap tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat (Islahi, 2014).

Relevansi pemikiran Abu Yusuf semakin menguat di tengah tantangan ekonomi global yang ditandai oleh meningkatnya ketimpangan pendapatan, keterbatasan ruang fiskal pemerintah, serta tuntutan terhadap sistem perpajakan yang lebih adil dan berkelanjutan (Hasni, & Maysarah, 2021). Penelitian terkini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip fiskal Abu Yusuf memiliki kesesuaian dengan konsep keadilan distributif, efisiensi fiskal, dan tata kelola keuangan publik modern. Hanum et al. (2025) menegaskan bahwa pemikiran Abu Yusuf menawarkan kerangka yang mampu menyeimbangkan efisiensi fiskal dengan distribusi kesejahteraan sosial. Sementara itu, Rosita et al. (2026) menemukan bahwa konsep produktivitas berbasis al-kharaj memiliki korespondensi normatif dengan prinsip keberlanjutan fiskal, akuntabilitas publik, dan reformasi perpajakan modern.

Kajian lain menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi Abu Yusuf tidak hanya relevan pada aspek perpajakan, tetapi juga pada pengelolaan sumber daya publik dan pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Fatoni (2022) menegaskan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Abu Yusuf mengintegrasikan dimensi moral, sosial, dan ekonomi dalam upaya mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian pula, Nahlah et al. (2024) menunjukkan bahwa *Kitab al-Kharaj* tidak hanya membahas pajak, tetapi juga tata kelola penerimaan negara, distribusi kekayaan, dan tanggung jawab pemerintah dalam menjamin kemakmuran rakyat.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas pemikiran ekonomi Abu Yusuf, sebagian besar masih berfokus pada aspek historis dan normatif perpajakan Islam. Kajian yang secara khusus menganalisis al-kharaj sebagai instrumen stabilitas ekonomi sekaligus sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka kebijakan fiskal modern masih relatif terbatas. Sebagian penelitian lebih banyak membahas relevansi al-kharaj terhadap sistem perpajakan Indonesia tanpa mengaitkannya secara komprehensif dengan fungsi stabilisasi ekonomi makro dan pembangunan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep al-kharaj dalam pemikiran Abu Yusuf serta menganalisis relevansinya sebagai instrumen stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat modern. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan kebijakan fiskal syariah yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan di era kontemporer.

2. Metode

Artikel ini merupakan artikel konseptual yang menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian bukan untuk menguji hubungan antarvariabel secara empiris, melainkan untuk memahami, menginterpretasikan, dan merekonstruksi konsep al-kharaj dalam pemikiran Abu Yusuf serta

menganalisis relevansinya terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat modern. Menurut Creswell dan Creswell (2023), penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang terkandung dalam fenomena sosial melalui interpretasi terhadap berbagai sumber data dan literatur. Demikian pula, Creswell dan Poth (2023) menjelaskan bahwa penelitian konseptual bertujuan membangun pemahaman teoritis melalui sintesis, evaluasi, dan reinterpretasi terhadap pengetahuan yang telah ada.

Sumber data penelitian terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer berupa *Kitab al-Kharaj* karya Abu Yusuf yang menjadi rujukan utama dalam mengidentifikasi konsep dasar al-kharaj, prinsip keadilan fiskal, sistem muqasamah, serta peran negara dalam pengelolaan penerimaan publik. Adapun sumber sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah bereputasi, prosiding, serta publikasi akademik yang membahas ekonomi Islam, kebijakan fiskal syariah, perpajakan Islam, dan pemikiran ekonomi Abu Yusuf, terutama yang diterbitkan dalam sepuluh tahun terakhir.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran literatur secara sistematis. Literatur dipilih berdasarkan relevansi tema, kredibilitas sumber, kontribusi teoritis, serta keterkaitannya dengan isu stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam.

Analisis data menggunakan metode *qualitative content analysis* (analisis isi kualitatif). Metode ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan tema-tema utama yang terkandung dalam teks secara sistematis (Kuckartz & Rädiker, 2023). Tahapan analisis meliputi: (1) identifikasi konsep-konsep utama dalam *Kitab al-Kharaj*; (2) pengelompokan tema berdasarkan kategori seperti keadilan fiskal, muqasamah, distribusi kekayaan, dan tanggung jawab negara; (3) interpretasi makna konseptual dari setiap kategori; serta (4) komparasi dengan teori perpajakan dan kebijakan fiskal kontemporer. Melalui tahapan tersebut, penelitian berupaya menjelaskan posisi al-kharaj sebagai instrumen fiskal yang tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mewujudkan keadilan sosial, stabilitas ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan pendekatan tersebut, artikel ini diharapkan mampu menghasilkan sintesis teoritis yang komprehensif mengenai relevansi pemikiran Abu Yusuf terhadap pengembangan kebijakan fiskal syariah di era modern.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Karakter Konseptual Al-Kharaj dalam Pemikiran Abu Yusuf

3.1.1 Posisi Al-Kharaj sebagai Instrumen Fiskal

Dalam pemikiran Abu Yusuf, al-kharaj tidak sekadar dipahami sebagai pungutan atas tanah, melainkan sebagai instrumen fiskal negara yang dirancang untuk mewujudkan keadilan ekonomi, menjaga keberlanjutan penerimaan negara, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui *Kitab al-Kharaj*, Abu Yusuf menegaskan bahwa pengelolaan pajak harus berorientasi pada kemaslahatan publik serta menghindari segala bentuk pemungutan yang dapat menimbulkan kezaliman terhadap masyarakat, khususnya para petani dan pengelola lahan produktif (Abu Yusuf, 1979).

Berbeda dengan praktik perpajakan yang bersifat eksploitatif pada sebagian wilayah kekuasaan saat itu, Abu Yusuf menempatkan negara sebagai pengelola amanah yang bertanggung jawab memastikan keseimbangan antara kebutuhan fiskal pemerintah dan kemampuan ekonomi masyarakat. Dalam perspektif tersebut, pajak tidak dipandang sebagai alat eksploitasi negara terhadap rakyat, tetapi sebagai mekanisme distribusi sumber daya yang digunakan untuk membiayai kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur, sistem irigasi, keamanan, dan pelayanan publik lainnya (Islahi, 2014).

Kajian kontemporer menunjukkan bahwa konsep al-kharaj yang dikembangkan Abu Yusuf memiliki kesesuaian dengan prinsip tata kelola fiskal modern yang menekankan keadilan distributif, akuntabilitas, dan keberlanjutan fiskal. Fatoni (2022) menjelaskan bahwa pemikiran

Abu Yusuf mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan moral dalam kebijakan fiskal sehingga penerimaan negara tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan pemerintah, tetapi juga sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan masyarakat. Temuan serupa disampaikan oleh Nahlah et al. (2024) yang menyatakan bahwa al-kharaj merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam yang menempatkan negara sebagai aktor utama dalam menjamin kemakmuran masyarakat melalui pengelolaan sumber daya publik secara adil dan produktif.

Dengan demikian, karakter utama al-kharaj dalam pemikiran Abu Yusuf terletak pada orientasinya terhadap kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'ammah*), keadilan fiskal (*al-'adalah*), dan tanggung jawab negara dalam menciptakan kesejahteraan sosial. Karakteristik tersebut menjadikan al-kharaj tidak hanya relevan sebagai instrumen fiskal pada masa klasik, tetapi juga memiliki nilai konseptual yang dapat digunakan sebagai landasan normatif dalam pengembangan kebijakan fiskal modern.

3.1.2 Prinsip Muqasamah dan Keadilan Pajak

Salah satu kontribusi penting Abu Yusuf dalam bidang fiskal adalah dukungannya terhadap penerapan sistem *muqasamah*, yaitu mekanisme pemungutan pajak berdasarkan proporsi hasil produksi. Sistem ini dianggap lebih adil dibandingkan *misahah*, yaitu sistem pajak tetap yang ditetapkan berdasarkan luas tanah tanpa mempertimbangkan tingkat produktivitas lahan atau kondisi ekonomi wajib pajak (Abu Yusuf, 1979).

Menurut Abu Yusuf, pemungutan pajak harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat agar tidak menimbulkan kesulitan yang dapat menghambat aktivitas produksi. Oleh karena itu, ketika hasil pertanian mengalami penurunan akibat faktor alam atau kondisi ekonomi tertentu, beban pajak yang ditanggung petani juga harus menyesuaikan. Pendekatan ini menunjukkan adanya prinsip *ability to pay* yang dalam teori perpajakan modern dipandang sebagai salah satu indikator utama keadilan fiskal (Islahi, 2014).

Dalam perspektif ekonomi Islam, sistem *muqasamah* mencerminkan implementasi prinsip keadilan (*al-'adalah*), kemudahan (*al-taysir*), dan kemaslahatan (*al-maslahah*) dalam kebijakan publik. Hasni dan Maysarah (2021) menjelaskan bahwa pendekatan tersebut memungkinkan negara memperoleh penerimaan yang berkelanjutan tanpa mengorbankan produktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, Hanum et al. (2025) menunjukkan bahwa prinsip proporsionalitas yang terkandung dalam *muqasamah* memiliki relevansi dengan konsep perpajakan modern yang berupaya menciptakan distribusi beban pajak secara lebih adil sesuai kapasitas ekonomi wajib pajak.

Dari perspektif kebijakan fiskal, penerapan sistem *muqasamah* menunjukkan bahwa Abu Yusuf telah mengembangkan konsep perpajakan yang adaptif terhadap dinamika ekonomi masyarakat. Prinsip tersebut menjadi penting dalam konteks kontemporer karena mampu mengurangi risiko ketimpangan fiskal serta meningkatkan legitimasi sosial terhadap kebijakan perpajakan. Dengan demikian, pemikiran Abu Yusuf mengenai *muqasamah* dapat dipandang sebagai salah satu fondasi konseptual bagi pengembangan sistem perpajakan yang berkeadilan, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

3.2 Al-Kharaj sebagai Instrumen Stabilitas Ekonomi

3.2.1 Basis Pendapatan Negara yang Stabil dan Berkelanjutan

Dalam perspektif Abu Yusuf, al-kharaj merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki karakter relatif stabil karena bersumber dari aktivitas ekonomi produktif, khususnya sektor pertanian dan pemanfaatan tanah. Melalui *Kitab al-Kharaj*, Abu Yusuf menekankan bahwa keberhasilan sistem perpajakan tidak hanya ditentukan oleh besarnya penerimaan yang diperoleh negara, tetapi juga oleh kemampuannya menjaga produktivitas masyarakat sebagai basis utama penerimaan tersebut (Abu Yusuf, 1979). Oleh sebab itu, kebijakan fiskal harus dirancang sedemikian rupa sehingga mampu menghasilkan pendapatan negara secara berkelanjutan tanpa mengurangi kapasitas produksi masyarakat.

Abu Yusuf memandang bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan

tersedianya infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi, seperti sistem irigasi, jalan, sarana transportasi, dan keamanan wilayah. Investasi pemerintah pada sektor-sektor tersebut diyakini akan meningkatkan produktivitas lahan dan aktivitas ekonomi masyarakat yang pada akhirnya memperkuat basis penerimaan fiskal negara. Dengan demikian, terdapat hubungan timbal balik antara penerimaan al-kharaj dan pembangunan ekonomi, di mana penerimaan negara digunakan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat, sementara peningkatan produktivitas tersebut akan memperkuat penerimaan negara pada periode berikutnya (Islahi, 2014).

Dalam perspektif ekonomi publik modern, gagasan tersebut memiliki kesesuaian dengan konsep *productive public expenditure*, yaitu pengeluaran pemerintah yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Stiglitz dan Rosengard (2015) menjelaskan bahwa kebijakan fiskal yang efektif tidak hanya berorientasi pada pengumpulan penerimaan negara, tetapi juga harus mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, konsep al-kharaj dapat dipahami sebagai instrumen fiskal yang mendukung keberlanjutan penerimaan negara sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Kajian kontemporer juga menunjukkan bahwa pemikiran Abu Yusuf memiliki relevansi terhadap konsep keberlanjutan fiskal (*fiscal sustainability*). Hanum et al. (2025) menemukan bahwa prinsip pengelolaan fiskal Abu Yusuf menekankan keseimbangan antara kebutuhan pendapatan negara dan perlindungan terhadap kapasitas ekonomi masyarakat. Pendekatan tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang menghendaki adanya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan keberlangsungan fiskal pemerintah.

Dengan demikian, al-kharaj tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penghimpunan penerimaan negara, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi yang menjadi sumber utama penerimaan tersebut. Karakteristik ini menjadikan al-kharaj memiliki fungsi stabilisasi ekonomi yang penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

3.2.2 Perbandingan dengan Pendekatan Fiskal Modern

Meskipun lahir pada abad ke-8, pemikiran fiskal Abu Yusuf menunjukkan sejumlah kesamaan dengan teori fiskal modern, terutama dalam hal pengakuan terhadap peran aktif negara dalam mengelola perekonomian. Abu Yusuf menegaskan bahwa negara tidak boleh bersikap pasif terhadap persoalan ekonomi masyarakat, melainkan harus berperan dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan tercapainya kemakmuran dan keadilan sosial melalui kebijakan fiskal yang tepat (Abu Yusuf, 1979).

Kesamaan tersebut dapat ditemukan dalam teori fiskal modern yang dikembangkan oleh John Maynard Keynes, yang menempatkan kebijakan fiskal sebagai instrumen utama untuk memengaruhi aktivitas ekonomi melalui pengelolaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara keduanya. Keynesianisme pada umumnya berfokus pada stabilisasi permintaan agregat dan penanganan fluktuasi ekonomi jangka pendek, sedangkan Abu Yusuf menempatkan keadilan distributif, kemaslahatan publik, dan tanggung jawab moral negara sebagai tujuan utama kebijakan fiskal (Blanchard, 2021).

Selain itu, konsep fiskal Abu Yusuf berakar pada nilai-nilai maqashid al-shariah yang menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan fiskal tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi atau peningkatan pendapatan negara, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan sosial. Dalam konteks ini, pemikiran Abu Yusuf menawarkan dimensi etis yang sering kali tidak menjadi fokus utama dalam teori fiskal konvensional.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas yang dikembangkan Abu Yusuf memiliki relevansi yang kuat dalam reformasi kebijakan fiskal di

negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Rosita et al. (2026) menegaskan bahwa integrasi nilai-nilai fiskal Islam ke dalam sistem keuangan publik modern berpotensi meningkatkan legitimasi kebijakan pemerintah sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Dengan demikian, pemikiran Abu Yusuf dapat dipandang sebagai kerangka normatif yang melengkapi pendekatan fiskal modern melalui penekanan pada dimensi moral, keadilan sosial, dan kemaslahatan publik.

Berdasarkan uraian tersebut, al-kharaj tidak hanya relevan sebagai konsep historis dalam ekonomi Islam, tetapi juga dapat diposisikan sebagai sumber inspirasi dalam pengembangan kebijakan fiskal modern yang berorientasi pada stabilitas ekonomi, keberlanjutan fiskal, dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

3.3 Al-Kharaj dan Kesejahteraan Masyarakat Modern

3.3.1 Orientasi Keadilan Sosial dan Distribusi Kekayaan

Salah satu tujuan utama sistem al-kharaj dalam pemikiran Abu Yusuf adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi kekayaan yang lebih adil dan pengelolaan keuangan publik yang bertanggung jawab. Dalam *Kitab al-Kharaj*, Abu Yusuf menegaskan bahwa penerimaan negara tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan kas negara, tetapi harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, memperbaiki infrastruktur publik, menjaga keamanan, serta meningkatkan kemakmuran rakyat secara luas (Abu Yusuf, 1979).

Orientasi tersebut menunjukkan bahwa pemikiran Abu Yusuf memiliki keterkaitan erat dengan konsep keadilan distributif (*distributive justice*), yaitu distribusi sumber daya ekonomi yang dilakukan secara proporsional dan berkeadilan. Dalam perspektif ekonomi Islam, keadilan distributif tidak hanya bertujuan mengurangi kesenjangan ekonomi, tetapi juga memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat serta terjaganya martabat manusia. Kajian terbaru mengenai keadilan distributif dalam ekonomi Islam menunjukkan bahwa distribusi kekayaan harus diarahkan pada perlindungan kebutuhan dasar, pengurangan ketimpangan, dan pencapaian kesejahteraan sosial yang berkelanjutan melalui kerangka maqashid al-shariah.

Dalam konteks tersebut, al-kharaj dapat dipandang sebagai instrumen fiskal yang mendukung redistribusi ekonomi melalui pengumpulan pendapatan negara yang kemudian dialokasikan untuk berbagai kepentingan publik. Menurut Rosita et al. (2026), pemikiran fiskal Abu Yusuf menempatkan keadilan distribusi, optimalisasi penerimaan berbasis produktivitas, dan akuntabilitas pengelolaan fiskal sebagai fondasi utama sistem keuangan publik. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa tujuan fiskal dalam Islam tidak berhenti pada penghimpunan penerimaan negara, melainkan juga pada penciptaan keseimbangan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kajian Nahlah et al. (2024) juga menunjukkan bahwa *Kitab al-Kharaj* tidak hanya membahas pajak tanah, tetapi mencakup pengelolaan sumber-sumber penerimaan negara, distribusi kekayaan, serta tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kemakmuran masyarakat. Oleh karena itu, pemikiran Abu Yusuf dapat dipahami sebagai salah satu fondasi awal konsep *Islamic welfare state* yang menempatkan negara sebagai penanggung jawab utama dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial.

Lebih lanjut, relevansi konsep al-kharaj terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat juga ditegaskan oleh Syamsuri dan Prastyaningsih (2018) yang menunjukkan bahwa pengelolaan pajak berbasis prinsip al-kharaj memiliki potensi untuk mendukung kesejahteraan masyarakat melalui sistem perpajakan yang adil, pengawasan fiskal yang efektif, dan distribusi manfaat pembangunan yang lebih merata.

Dengan demikian, al-kharaj dalam pemikiran Abu Yusuf tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penerimaan negara, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi ekonomi yang berorientasi pada pengurangan kesenjangan sosial, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pencapaian keadilan ekonomi secara berkelanjutan.

3.3.2 Relevansi Konsep Al-Kharaj bagi Reformasi Fiskal Kontemporer

Di tengah meningkatnya ketimpangan pendapatan, keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah, serta tuntutan terhadap tata kelola keuangan publik yang lebih transparan, prinsip-prinsip al-kharaj memiliki relevansi yang semakin kuat dalam reformasi fiskal kontemporer. Abu Yusuf menekankan bahwa pemungutan pajak harus dilakukan secara proporsional, mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat, dan diikuti dengan pengelolaan anggaran yang amanah serta berorientasi pada kemaslahatan umum (Abu Yusuf, 1979).

Dalam konteks negara berkembang, prinsip tersebut sejalan dengan kebutuhan untuk membangun sistem perpajakan yang tidak hanya efisien dalam menghimpun penerimaan negara, tetapi juga mampu meningkatkan legitimasi sosial dan kepatuhan wajib pajak. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, amanah, dan penghindaran beban pajak yang berlebihan sebagaimana diajarkan Abu Yusuf memiliki pengaruh positif terhadap persepsi masyarakat terhadap sistem perpajakan modern dan berpotensi meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Isro (2025) juga menunjukkan bahwa prinsip-prinsip fiskal Abu Yusuf dapat ditransformasikan menjadi model kebijakan fiskal syariah yang lebih inklusif dalam menghadapi tantangan negara berkembang, seperti ketimpangan distribusi pendapatan, keterbatasan ruang fiskal, dan rendahnya akses masyarakat terhadap manfaat pembangunan. Dalam perspektif tersebut, reformasi fiskal tidak hanya dipandang sebagai upaya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperluas kesejahteraan sosial dan memperkuat stabilitas ekonomi nasional.

Selain itu, berbagai kajian mengenai keuangan publik Islam menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap penerimaan publik dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang berkualitas, perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Perspektif ini sejalan dengan prinsip maqashid al-shariah yang menempatkan kesejahteraan manusia (*falah*) sebagai tujuan utama kebijakan ekonomi.

Oleh karena itu, konsep al-kharaj Abu Yusuf tetap relevan sebagai kerangka normatif dalam pengembangan kebijakan fiskal modern. Prinsip keadilan pajak, akuntabilitas pengelolaan keuangan publik, keberlanjutan fiskal, dan orientasi terhadap kesejahteraan masyarakat menjadikan al-kharaj bukan sekadar warisan pemikiran ekonomi Islam klasik, tetapi juga sumber inspirasi bagi reformasi sistem fiskal yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan pada era kontemporer.

4. Penutup

Kajian ini menunjukkan bahwa konsep *al-kharaj* dalam pemikiran Abu Yusuf tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pungutan atas tanah, tetapi juga merupakan instrumen fiskal yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan masyarakat. Melalui *Kitab al-Kharaj*, Abu Yusuf menekankan pentingnya prinsip keadilan pajak, kemampuan membayar (*ability to pay*), akuntabilitas pengelolaan keuangan publik, serta tanggung jawab negara dalam menjamin kemakmuran rakyat. Sistem *muqasamah* yang ditawarkannya menunjukkan bahwa beban pajak harus disesuaikan dengan tingkat produktivitas dan kondisi ekonomi masyarakat sehingga mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan negara dan kesejahteraan wajib pajak.

Hasil pembahasan juga memperlihatkan bahwa *al-kharaj* memiliki fungsi yang lebih luas sebagai instrumen stabilitas ekonomi. Penerimaan negara yang diperoleh melalui sistem perpajakan yang adil dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, perlindungan sosial, dan berbagai kebutuhan masyarakat yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dalam konteks kontemporer, prinsip-prinsip yang dikembangkan Abu Yusuf memiliki relevansi dengan konsep keberlanjutan fiskal, keadilan distributif, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, pemikiran Abu Yusuf dapat dipandang sebagai salah satu landasan normatif bagi pengembangan kebijakan fiskal yang lebih

inklusif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Meskipun demikian, penelitian ini masih bersifat konseptual dan berbasis studi pustaka sehingga belum menguji implementasi prinsip-prinsip *al-kharaj* dalam sistem perpajakan modern secara empiris. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji penerapan konsep *al-kharaj* pada kebijakan fiskal kontemporer, seperti pajak bumi dan bangunan, pajak sektor pertanian, maupun kebijakan redistribusi fiskal di Indonesia. Kajian empiris mengenai hubungan antara keadilan pajak, kepatuhan wajib pajak, efektivitas belanja publik, stabilitas fiskal, dan kesejahteraan masyarakat juga penting dilakukan guna memperkuat kontribusi pemikiran Abu Yusuf dalam pengembangan sistem fiskal syariah yang aplikatif dan berkelanjutan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Institut Agama Islam As-Syifa yang telah memberikan bantuan akademis dalam penyusunan artikel ini. Selain itu, ucapan terima kasih disampaikan kepada para dosen dan pihak-pihak yang telah memberikan bimbingan, saran, dan motivasi selama proses penulisan artikel ini. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada para peneliti dan pendahulu yang telah membantu mengembangkan penelitian tentang pemikiran ekonomi Islam Abu Yusuf, terutama konsep *al-kharaj* sebagai alat untuk stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kami berharap tulisan ini akan membantu kemajuan ilmu ekonomi Islam, terutama dalam studi kebijakan fiskal syariah dan tata kelola kesejahteraan masyarakat kontemporer.

Referensi

- Abu Yusuf. (1979). *Kitab al-Kharaj*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Blanchard, O. (2021). *Macroeconomics (8th ed.)*. Pearson.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (6th ed.)*. SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2023). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (5th ed.)*. SAGE Publications.
- Fatoni, S. N. (2022). Abu Yusuf's economic thought: Principles, methodologies, and relevance to modern Islamic economics. *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2). DOI: 10.15575/am.v8i2.44126.
- Hanum, F., Yazid, M., Musfiqoh, S., & Bakhri, S. (2025). Relevansi prinsip efisiensi dan distribusi fiskal Abu Yusuf dalam kebijakan fiskal Indonesia. *Moderasi: Journal of Islamic Studies*, 5(2). DOI: 10.54471/moderasi.v5i2.160.
- Hasni, H., & Maysarah, S. (2021). Konsep perpajakan dalam Kitab Al-Kharaj relevansi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 2(1), 72–85.
- Islahi, A. A. (2014). *Economic Thinking of Abu Yusuf*. Islamic Economics Research Center, King Abdulaziz University.
- Isro, A. (2025). The transformation of Abu Yusuf's fiscal principles: Formulating inclusive sharia policies for economic stability and welfare in developing countries. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. DOI: 10.30868/ad.v9i02.9009.
- Kuckartz, U., & Rädiker, S. (2023). *Qualitative content analysis: Methods, practice and software (2nd ed.)*. SAGE Publications.
- Mukaromah, L., Safari, M. D. E. T., Susanti, H., Supriadi, & Rachmawati, A. (2026). Relevansi pemikiran Abu Yusuf dalam Kitab Al-Kharaj terhadap perhitungan pajak modern serta pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak. *JAMER: Jurnal Akuntansi Merdeka*, 6(2). DOI: 10.33319/jamer.v6i2.152.
- Muslim, R., Romdhane, H. B., Ali, A., & Ibrahim, F. (2026). Reconstruction of the concept of distributive justice in Islamic economics: A normative analysis of contemporary maqāṣid al-sharī'ah. *Al-Muwazanah: Indonesian Journal of Islamic Economics*. Vol. 2 No. 1 (2026). <https://journal.zmsadra.or.id/index.php/ijie/article/view/276>
- Nahlah, N., Kara, M., Ambo Masse, R., & Hamka. (2024). Konsep ekonomi Islam: Pemikiran

- Abu Yusuf. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 7(1), 25–35. DOI: 10.31949/maro.v7i1.5968.
- Rosita, R. R., Saskya, W., Diyana, A. F., & Marlina, L. (2026). Abu Yusuf's fiscal thought in the book of Al-Kharaj and its relevance to the modern public financial system. *Al Urwah: Sharia Economics Journal*, 2(3), 24–28. DOI: 10.61536/alurwah.v2i3.456.
- Stiglitz, J. E., & Rosengard, J. K. (2015). *Economics of the Public Sector (4th ed.)*. W.W. Norton & Company.
- Syamsuri, S., & Prastyaningsih, I. (2018). Upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan pajak: Relevansi konsep al-Kharaj Abu Yusuf di Indonesia. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), 236–256. <https://doi.org/10.21274/an.2018.5.1.236-256>